

# **SKRIPSI**

***DIAN FITRIANA***

## **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAKTEK KAWIN KONTRAK**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2001**

# **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAKTEK KAWIN KONTRAK**

## **SKRIPSI**

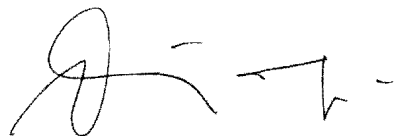
**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS-TUGAS DAN MEMENUHI  
SYARAT-SYARAT UNTUK MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA HUKUM**

**PEMBIMBING,**



**( LILIEK KAMILAH, S.H., M.HUM )**

**PENYUSUN,**



**( DIAN FITRIANA )**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**2001**

## **Bab IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Dari uraian yang telah ada pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa :

- a Kedudukan kawin kontrak atau nikah mut'ah menurut ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 itu merupakan perkawinan yang bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Pelaksanaan kawin kontrak ini dilarang. Dasar pertimbangan yang dapat dipakai adalah :
  - Kawin kontrak ini bertentangan dengan dasar perkawinan yang telah ditetapkan dalam Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974.
  - Kawin kontrak tidak memenuhi syarat keabsahan perkawinan dan ketentuan pencatatan yang ditentukan Pasal 2 UU No. 1 tahun 1974.
  - Kawin kontrak tidak mengenal jangka waktu tunggu atau masa iddah yang telah ditentukan pada Pasal 11 UU No. 1 tahun 1974.
  - Kawin kontrak menyalahi ketentuan Pasal 12 UU No. 1 tahun 1974 tentang tata cara pelaksanaan perkawinan.
- b Pelaksanaan kawin kontrak di Indonesia telah jauh menyimpang dari ketentuan dari Undang-Undang Perkawinan dan cenderung pada

bentuk kegiatan pelacuran. Adanya pelaksanaan praktek kawin kontrak didasari oleh pelaksanaan kawin kontrak yang identik dengan nikah mut'ah yang pada awal islam diperbolehkan.

- c Menurut ketentuan Hukum Islam pelaksanaan kawin kontrak adalah suatu perbuatan yang diharamkan dan digolongkan perbuatan zina karena kawin kontrak ini tidak sesuai dengan perkawinan yang diatur dalam Al. Quran. Secara tegas telah dijelaskan tentang adanya penghapusan hukum diperbolehkannya kawin kontrak. Ketentuan tentang hukum kawin kontrak dalam Islam telah jelas dan telah disepakati oleh ulama hanya saja pelaku kawin kontrak yang mengingkarinya hanya untuk tujuan yang menyimpang dari tujuan perkawinan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang dan ketentuan dalam Hukum Islam.

#### **4.2. Saran**

Melihat kedudukan kawin kontrak dan pelaksanaannya di Indonesia maka saran yang dapat saya utarakan adalah:

- a. Perlu adanya sosialisasi peraturan perundang-undangan perkawinan pada masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui dialog interaktif di televisi atau radio dimana kedua media ini sangat berpengaruh.
- b. Perlunya pemahaman pengertian kawin kontrak yang lebih luas agar masyarakat awam yang kurang mengerti tentang hukum perkawinan ini baik dari hukum Islam dan menurut ketentuan UU No. 1 tahun 1974. Hal

ini dapat dilakukan dengan mencantumkan ketentuan tentang pelarangan kawin kontrak secara tegas dalam perundangan-undangan.